

## DOMINASI BERAS DALAM KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEANEKARAGAMAN PANGAN LOKAL: PERSPEKTIF PANCASILA

Annisa Putri Nurul Aini<sup>1</sup>, Malika Jazin<sup>2</sup>, Moch Bintang Nuralam<sup>3</sup>, Muhammad Ibrahim Qurataayun<sup>4</sup>, Rahadian Abimanyu Kusumadijaya<sup>5</sup>, Siringoringo Ilga Ivanna Olivera<sup>6</sup>, Ratna Fitria<sup>7</sup>

[annisaputri.na@student.upi.edu](mailto:annisaputri.na@student.upi.edu)<sup>1</sup>, [malikajazin@student.upi.edu](mailto:malikajazin@student.upi.edu)<sup>2</sup>,  
[mochbintang123@student.upi.edu](mailto:mochbintang123@student.upi.edu)<sup>3</sup>, [ibrasurvey0@gmail.com](mailto:ibrasurvey0@gmail.com)<sup>4</sup>, [kakaabi2000@gmail.com](mailto:kakaabi2000@gmail.com)<sup>5</sup>,  
[siringoringo.ilga@student.upi.edu](mailto:siringoringo.ilga@student.upi.edu)<sup>6</sup>, [ratna\\_fitria@upi.edu](mailto:ratna_fitria@upi.edu)<sup>7</sup>

Universitas Pendidikan Indonesia

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Pasar Pagi Parluasan Pematangsiantar sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan dan daya saing usaha. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, namun masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengelolaan SDM, kualitas pelayanan, serta kemampuan bersaing di tengah perkembangan pasar yang semakin kompetitif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan SDM melalui pelatihan pelayanan, peningkatan keterampilan komunikasi, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan etos kerja mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen. Selain itu, pemberdayaan SDM juga berdampak pada meningkatnya loyalitas pelanggan, produktivitas usaha, dan kemampuan UMKM dalam menghadapi persaingan pasar. Kendala yang dihadapi meliputi rendahnya tingkat pendidikan pelaku usaha, keterbatasan modal, serta kurangnya akses terhadap pelatihan dan pendampingan usaha. Oleh karena itu, diperlukan dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait dalam menyediakan program pelatihan dan pengembangan SDM yang berkelanjutan. Dengan adanya pemberdayaan SDM yang optimal, UMKM di Pasar Pagi Parluasan Pematangsiantar diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat daya saing usaha secara berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Dominasi Beras, Pangan Lokal, Kebijakan Pangan Nasional, Keanekaragaman Pangan, Homogenisasi Budaya, Pancasila.

### ABSTRACT

*Local food diversity in Indonesia faces significant pressure due to the dominance of rice as the sole staple food commodity, a policy systematically enforced since the Green Revolution era in the late 1960s. This policy has caused local foods such as sago, corn, cassava, and sweet potatoes in various regions to lose their structural position in people's lives. This article aims to analyze the impact of rice dominance on local food diversity while assessing its alignment with the values of Pancasila. The research employs a qualitative approach through a literature review, utilizing data sources from scientific journals, books, and official government documents related to food security and diversification. The analysis is conducted narratively using the frameworks of the Third and Fifth Principles of Pancasila. The findings indicate that rice-based food homogenization has significantly reduced the consumption of local foods, as evidenced by the decline in cassava consumption from 13.4 kg per capita in 1999 to 6.5 kg per capita in 2014, with a similar trend observed for sago in its traditional regions. From the perspective of Pancasila, this policy contradicts the spirit of unity in diversity and the principle of social justice for all the people of Indonesia. Therefore, food policy reform is needed to provide equal recognition for local foods in order to achieve inclusive and sustainable food security.*

**Keywords:** Rice Dominance, Local Food, National Food Policy, Food Diversity, Cultural Homogenization, Pancasila.

## PENDAHULUAN

Bicara soal pangan, rasanya tidak bisa dilepaskan dari siapa kita sebagai bangsa. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keberagaman, dan keberagaman itu pun tercermin dalam tradisi makan masyarakatnya. Masyarakat di Jawa dan Sumatera sudah lama akrab dengan nasi sebagai santapan sehari-hari, sementara saudara-saudara kita di Papua, Maluku, Nusa Tenggara Timur, hingga sebagian Kalimantan justru tumbuh besar dengan sagu, ubi, dan jagung sebagai penganan utama mereka. Perbedaan ini bukan sekadar soal selera, melainkan cerminan dari letak geografis, budaya, dan kearifan lokal yang sudah mengakar jauh sebelum negara ini berdiri (Gardjito, Santoso, & Harmayani, 2024).

Sayangnya, potret keberagaman itu perlahan-lahan mulai pudar. Sejak Orde Baru menggulirkan program Revolusi Hijau pada akhir 1960-an, beras mendapat posisi yang jauh lebih istimewa dibanding pangan lokal lainnya. Beras bukan sekadar makanan, ia dijadikan simbol kemakmuran dan tolok ukur stabilitas nasional (Zuryani, 2018). Kebijakan ini memang berhasil mendongkrak produksi padi secara masif, tetapi di sisi lain justru meminggirkan singkong, sagu, jagung, dan berbagai pangan lokal lain yang tidak kalah bergizi. Lama-lama, masyarakat di daerah yang tadinya tidak mengenal nasi pun mulai beralih, bukan karena pilihan, melainkan karena dorongan kebijakan yang membuat beras seolah menjadi satu-satunya pilihan yang "sah."

Proses inilah yang dalam kajian budaya dikenal sebagai homogenisasi — ketika satu budaya atau kebiasaan mendominasi dan perlahan menggantikan yang lain (Piliang, 2005). Dalam urusan pangan, dampaknya cukup serius: para petani dan masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidup pada pangan tradisional mereka mulai kehilangan ruang, baik secara ekonomi maupun kultural. Yang lebih mengkhawatirkan, ketergantungan pada satu komoditas tunggal justru membuat ketahanan pangan nasional menjadi rapuh.

Bila ditelaah dari sudut pandang Pancasila, kebijakan semacam ini menimbulkan pertanyaan yang cukup mendasar. Sila Ketiga berbicara soal persatuan, tetapi persatuan yang dimaksud bukan berarti semua harus sama — justru sebaliknya, *unity in diversity* menghendaki bahwa keberagaman itulah yang dijaga dan dihormati, bukan dihapus atas nama keseragaman (Kaelan, 2018). Begitu pula Sila Kelima yang mengamanatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia — artinya, kebijakan pangan pun seharusnya berpihak secara adil pada seluruh daerah dengan potensi pangannya masing-masing, bukan hanya pada daerah penghasil beras (Latif, 2020).

Berangkat dari persoalan itulah artikel ini ditulis. Tujuannya adalah untuk melihat lebih dalam bagaimana dominasi beras dalam kebijakan pangan nasional berdampak pada keanekaragaman pangan lokal, sekaligus menilai apakah kebijakan yang selama ini berjalan sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pada akhirnya, artikel ini juga berupaya menawarkan sudut pandang alternatif menuju kebijakan pangan yang lebih adil, inklusif, dan menghargai kekayaan budaya bangsa sendiri.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka atau *library research*. Pilihan metode ini didasarkan pada sifat kajian yang lebih banyak bertumpu pada penelaahan terhadap sumber-sumber tertulis, bukan pengumpulan data langsung di lapangan. Dengan cara ini, pembahasan dapat lebih terfokus pada upaya memahami dan menganalisis secara kritis bagaimana kebijakan pangan nasional khususnya yang berkaitan dengan dominasi beras bersinggungan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama dari sudut pandang keberagaman pangan lokal (Moleong, 2017).

Data yang digunakan sepenuhnya bersumber dari literatur sekunder, diantaranya buku-

buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta dokumen dan laporan resmi dari pemerintah yang berkaitan dengan ketahanan pangan, diversifikasi pangan, dan nilai-nilai Pancasila. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, memilah, dan mencatat berbagai sumber yang dianggap relevan dengan topik yang dibahas. Agar pembahasan tidak terlalu sempit, literatur yang dipilih sengaja mencakup beragam bidang kajian, mulai dari sejarah dan sosiologi, kebijakan publik, hingga kajian budaya dan filsafat Pancasila.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan cara membaca ulang dan menelaah isi literatur secara kritis, lalu menyaring bagian-bagian yang paling relevan dengan permasalahan yang diangkat. Temuan dari berbagai sumber kemudian disusun dan diinterpretasikan secara naratif sebelum ditarik kesimpulan secara menyeluruh (Miles & Huberman, 1994). Seluruh proses analisis ini menggunakan nilai-nilai Pancasila terutama Sila Ketiga dan Sila Kelima sebagai kerangka berpikir utama untuk menilai apakah arah kebijakan pangan nasional yang ada sudah sejalan dengan semangat keberagaman dan keadilan yang diamanatkan oleh Pancasila.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil studi pustaka dari berbagai sumber literatur, ditemukan fakta bahwa masyarakat Indonesia memiliki makanan pokok yang beragam. Di Pulau Sumatera dan Jawa, kebanyakan masyarakatnya mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Sementara di Indonesia bagian Timur (Nusa Tenggara Timur, Papua, Maluku dan Kalimantan) masyarakatnya terbiasa mengonsumsi ubi, sagu dan jagung sebagai makanan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan letak geografis, adat, dan budaya di setiap daerah (Murdijati et al., 2024).

Dalam pembahasan mengenai sosiologi dan studi budaya, fenomena penyeragaman pola konsumsi masyarakat dapat ditinjau melalui konsep yang disebut homogenisasi budaya. Menurut Yasraf Amir Piliang (2005), pakar kebudayaan dan media, homogenisasi terjadi ketika budaya lokal terseret arus globalisasi. Jika arus tersebut lebih dominan, maka budaya lokal akan semakin tersingkirkan dan kehilangan keunikannya, yang kemudian tergantikan dengan keseragaman.

Dalam hal ini, beras menjadi komoditas pangan pokok dominan di Indonesia dibandingkan dengan sumber pangan pokok yang lain seperti ubi, singkong, jagung maupun sagu. Akar sejarah penyeragaman ini dimulai dari kebijakan rezim Orde Baru yang berfokus pada program 'Revolusi Hijau' sejak akhir 1960-an, di mana beras ditempatkan sebagai tolok ukur utama stabilitas ekonomi dan politik nasional (Zuryani, 2018).

Meskipun Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2026) menyatakan keberhasilan program swasembada beras, kebijakan penyeragaman pangan pokok tunggal kurang sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya Sila Ketiga dan Sila Kelima. Semangat persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga Pancasila seharusnya dimaknai dengan *unity in diversity*, bukan penyeragaman mutlak yang bersifat *uniformity* (Kaelan, 2018). Perlindungan keberagaman pangan lokal seharusnya menjadi bagian dari menjaga identitas kultural dan kedaulatan daerah, sehingga memaksakan satu jenis pangan pokok nasional secara tidak langsung mengancam budaya pangan komunitas adat. Sementara itu, Sila Kelima Pancasila menekankan adanya pemenuhan hak atas pangan yang adil dan merata berbasis potensi asli daerah (Latif, 2020).

Jika instrumen kebijakan negara hanya berpihak pada beras dan mengabaikan produsen pangan lokal yang lain seperti singkong, sagu atau jagung, maka akan terjadi ketimpangan struktural. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan kebijakan yang memberikan ruang, fasilitas, serta pengakuan yang setara bagi kemandirian pangan berbasis potensi lokal

untuk mewujudkan keadilan sosial serta ketahanan pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dominasi beras sebagai pangan pokok nasional membawa perubahan yang cukup besar terhadap keberadaan pangan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Pergeseran tersebut tidak dapat dipahami hanya sebagai perubahan selera masyarakat terhadap jenis makanan tertentu, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan pangan nasional yang sejak lama menempatkan beras sebagai komoditas utama. Pada masa Orde Baru, kebijakan Revolusi Hijau melalui program Bimas dan Inmas mendorong peningkatan produksi sekaligus distribusi beras secara luas ke berbagai wilayah Indonesia, termasuk daerah yang secara geografis dan budaya tidak bergantung pada padi sebagai makanan pokok, seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur (Ariani, 2016). Kondisi tersebut memperkuat posisi beras sebagai pangan utama nasional, sementara pangan lokal seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian berada pada posisi yang semakin terbatas.

Ketimpangan tersebut tidak hanya terlihat pada tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga dari arah pembangunan pangan yang lebih banyak berfokus pada komoditas padi. Selama beberapa dekade, dukungan berupa penelitian pertanian, subsidi produksi, hingga pembangunan infrastruktur pangan lebih banyak diarahkan pada pengembangan beras dibandingkan pangan lokal. Dalam situasi tersebut, pangan lokal tidak memiliki ruang berkembang yang setara. Hal ini kemudian memengaruhi pola konsumsi masyarakat di berbagai daerah. Ariani (2016) menunjukkan bahwa konsumsi ubi kayu nasional mengalami penurunan dari 13,4 kg per kapita pada tahun 1999 menjadi 6,5 kg per kapita pada tahun 2014. Penurunan serupa juga terjadi pada daerah yang sebelumnya memiliki tradisi konsumsi pangan lokal yang cukup kuat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dominasi beras tidak hanya dibentuk oleh preferensi masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan yang secara bertahap membentuk kebiasaan konsumsi masyarakat.

Perubahan tersebut kemudian terlihat dalam budaya konsumsi sehari-hari. Beras tidak lagi dipahami hanya sebagai salah satu sumber karbohidrat, tetapi berkembang menjadi standar utama dalam pemaknaan aktivitas makan. Ungkapan “belum makan kalau belum nasi” menunjukkan bahwa nasi menempati posisi khusus dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dalam praktiknya, pangan lokal seperti jagung, singkong, atau sagu sering kali tidak lagi diposisikan sebagai makanan pokok yang setara dengan nasi, melainkan sebagai makanan pelengkap atau alternatif.

Penelitian Suharko (2019) di Desa Pagerejo, Wonosobo menunjukkan bahwa jagung masih dikonsumsi oleh sebagian masyarakat, tetapi keberadaannya tidak lagi dipandang setara dengan beras. Jagung lebih banyak dikaitkan dengan kebiasaan lama dan secara perlahan kehilangan posisi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi yang serupa juga terjadi di wilayah lain ketika singkong dan sagu mulai dipandang sebagai pangan tradisional yang tidak lagi menjadi pilihan utama. Pada saat yang sama, beras semakin melekat dengan gambaran pangan utama yang praktis, umum dikonsumsi, dan lebih mudah diakses. Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa homogenisasi pangan tidak hanya memengaruhi apa yang dikonsumsi masyarakat, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat memaknai makanan pokok.

Dampak yang muncul kemudian tidak berhenti pada perubahan pola konsumsi, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan identitas pangan daerah. Di banyak wilayah Indonesia, pangan lokal tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga menjadi bagian dari praktik budaya masyarakat setempat. Di Maluku, misalnya, sagu memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan sosial masyarakat, mulai dari proses pengolahan, kebiasaan konsumsi bersama, hingga pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Ketika konsumsi sagu menurun, perubahan yang terjadi bukan hanya pergantian jenis makanan, tetapi juga berkurangnya praktik budaya yang selama ini melekat pada pangan tersebut.

Samosir dan Thamrin (2019) mencatat bahwa konsumsi sagu di wilayah yang selama ini bergantung pada komoditas tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam dua dekade terakhir. Penurunan tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan pangan lokal semakin menghadapi tekanan di tengah dominasi beras sebagai pangan nasional. Hal ini diperkuat oleh Sugeng dan Fitria (2023) yang menjelaskan bahwa kebijakan pangan di Indonesia selama ini lebih menekankan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan pangan melalui satu komoditas utama, sementara pengetahuan pangan lokal belum sepenuhnya menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Temuan Indriastuti et al. (2024) juga menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pangan nasional telah memberi ruang bagi diversifikasi pangan, pelaksanaannya masih lebih berfokus pada beras sebagai komoditas utama.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menunjukkan bahwa homogenisasi pangan berbasis beras berdampak pada menurunnya posisi pangan lokal di berbagai daerah di Indonesia. Pangan lokal tidak sepenuhnya hilang, namun keberadaannya semakin bergeser dari makanan pokok sehari-hari menjadi pangan alternatif atau pangan yang hanya dikonsumsi dalam konteks tertentu. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mempersempit keberagaman pangan Indonesia sekaligus mengurangi keterikatan masyarakat terhadap pangan khas daerahnya masing-masing.

Secara filosofis, dominasi beras dalam kebijakan pangan nasional tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mendasar seperti apakah kebijakan ini sejalan dengan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila? Sila Ketiga, Persatuan Indonesia, kerap disalahartikan sebagai seruan menuju keseragaman. Padahal, Kaelan (2018) menegaskan bahwa persatuan yang dimaksud Pancasila adalah *unity in diversity*— bukan *uniformity* yang memaksa seluruh rakyat tunduk pada satu standar tunggal. Dalam konteks pangan, menjaga keberagaman pangan lokal justru merupakan wujud nyata dari semangat persatuan itu sendiri, karena pangan tradisional seperti sagu di Maluku, jagung di Wonosobo, atau ubi di Papua bukan sekadar sumber kalori, melainkan identitas kultural komunitas yang telah hidup jauh sebelum negara ini berdiri. Memaksakan beras sebagai satu-satunya "pangan sah" secara tidak langsung mengikis keberagaman yang seharusnya menjadi kekuatan bangsa.

Di sisi lain, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menuntut agar setiap daerah dengan potensi pangannya masing-masing mendapat pengakuan dan dukungan yang setara dari negara. Latif (2020) menjelaskan bahwa keadilan sosial dalam Pancasila bukan sekadar pemerataan distribusi, melainkan keadilan yang berpijak pada penghormatan terhadap keunikan dan kebutuhan tiap komunitas. Kebijakan yang selama ini lebih banyak mengucurkan subsidi, riset pertanian, dan infrastruktur untuk beras— sementara pangan lokal dibiarkan berjuang tanpa ruang— menciptakan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan amanat sila kelima. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang pangan berarti memberi kedudukan yang setara bagi singkong, sagu, jagung, dan umbi-umbian sebagai bagian dari kemandirian pangan bangsa yang sesungguhnya.

## **KESIMPULAN**

Dominasi beras dalam kebijakan pangan nasional Indonesia merupakan warisan struktural dari rezim Orde Baru yang menempatkan beras sebagai simbol stabilitas ekonomi dan politik melalui program Revolusi Hijau. Akibatnya, pangan lokal seperti sagu, jagung, ubi, dan singkong secara perlahan tergeser— bukan karena masyarakat memilih untuk meninggalkannya, tetapi karena kebijakan selama puluhan tahun memang tidak memberi ruang yang setara bagi keduanya. Konsumsi pangan lokal menurun drastis, identitas budaya pangan daerah melemah, dan ketergantungan pada satu komoditas tunggal justru membuat

ketahanan pangan nasional menjadi rapuh.

Ditinjau dari perspektif Pancasila, kebijakan ini belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Ketiga dan Sila Kelima. Persatuan Indonesia yang sejati menghendaki *unity in diversity*, bukan penyeragaman yang menghapus keberagaman kultural. Sementara keadilan sosial mengharuskan negara hadir secara adil bagi seluruh komunitas pangan di setiap penjuru nusantara, bukan hanya bagi daerah penghasil beras. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan pangan yang benar-benar inklusif: memberikan pengakuan, dukungan riset, subsidi, dan infrastruktur yang setara bagi pangan lokal, sehingga diversifikasi pangan bukan sekadar jargon, melainkan langkah nyata menuju kedaulatan dan ketahanan pangan Indonesia yang berkeadilan dan berlandaskan Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, M. (2016). Pergeseran konsumsi pangan lokal, suatu keprihatinan. Dalam E. Pasandaran, R. Heriawan, & M. Syakir (Eds.), *Pangan lokal: Budaya, potensi dan prospek pengembangan*. IAARD Press.
- Arimbawa, I. M. G. (2011, August 11). *Revitalisasi Seni Tradisional Dalam Kreativitas Seni Rupa Dan Desain Sebagai Upaya Membangun Karakter Bangsa Di Era Global (Bagian I)*. ISI BALI.
- BRIN. (2023). *Diversifikasi pangan lokal untuk ketahanan pangan: Perspektif ekonomi, sosial, dan budaya*. Penerbit BRIN. <https://doi.org/10.55981/brin.918.c791>
- Budiman, N. D., & Santu, L. (2024). Kajian strategi dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mencapai target swasembada beras. *Cemara*, 21(2), 125–134.
- Gardjito, M., Santoso, U., & Harmayani, E. (2024). *Seri pusaka cita rasa indonesia: Makanan pokok dan ragam hidangan nasi*. Andi Publisher.
- Kaelan. (2018). *Pendidikan Pancasila: Edisi Reformasi*. Yogyakarta: Paradigma.
- Latif, Y. (2020). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualisasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Martianto, D., Briawan, D., Ariani, M., & Yulianis, N. (2009). Percepatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal: Perspektif pejabat daerah dan strategi pencapaiannya. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 4(3), 123-131.
- Nuryanti, S. (2017). Swasembada beras berkelanjutan: Dilema antara stabilisasi harga dan distribusi pendapatan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 35(1), 19–30. <https://doi.org/10.21082/fae.v35n1.2017.19-30>
- Reardon, T., Stringer, R., Timmer, C. P., Minot, N., & Daryanto, A. (2015). Transformation of the Indonesian agrifood system and the future beyond rice: A special issue. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51(3), 369–373. <https://doi.org/10.1080/00074918.2015.1111827>
- Samekto, F. A., & Purwanti, A. (2021). Tantangan Indonesia dalam taman sari dunia: Mewujudkan kedaulatan pangan. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.52738/pjk.v1i1.2>
- Samosir, Y. M., & Thamrin, M. (2019). Pergeseran konsumsi sagu di wilayah tradisional sagu: Analisis sosio-kultural. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 15(2), 135–146.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2026, 7 Januari). *Swasembada Pangan 2025: Tonggak Sejarah Kemandirian Pangan Indonesia*. [Setkab.go.id](https://setkab.go.id/indonesia-swastembada-pangan-2025-catat-sejarah/). <https://setkab.go.id/indonesia-swastembada-pangan-2025-catat-sejarah/>
- Sugeng, S., & Fitria, A. (2023). Food sovereignty for Indonesia: The epistemological dimension of knowledge and variety of local food. *Jurnal Analisis Hukum*, 6(1), 18–32. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4179>
- Suharko. (2019). Mempertahankan budaya pangan lokal berbasis jagung: Studi kasus di Desa Pagerejo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 7(1), 57–64. <https://journal.ipb.ac.id/sodality/article/view/25458>
- Zuryani, N. (2018). Politik Pangan Orde Baru dan Implikasinya terhadap Keberlanjutan Pangan Lokal. *Jurnal Sejarah dan Budaya*, 12(1), 34-47.